

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor:102/Pid.B/2016/PN.Pdl)**

SKRIPSI

Oleh :

Mar'ie Muhammad

NIM: C93215064



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mar'ie Muhammad
NIM : C93215064
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Putusan Tindak Pidana Penadahan
Kendaraan Bermotor (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:
102/Pid.B/2016/PN.Pdl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 April 2019

Saya yang menyatakan



Mar'ie Muhammad
NIM. C93215064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mar'ie Muhammad NIM: C93215064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 April 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mar'ie Muhammad NIM. C93215064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



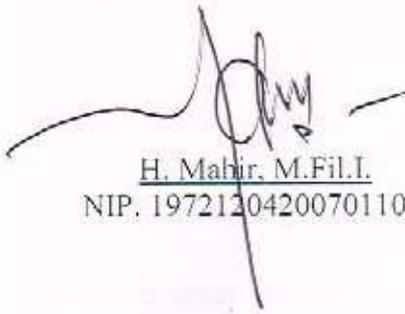
Prof. Dr. H. Itri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji II



Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III



H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Dr. H. Moh. Mufid, L.c., MHI
NIP. 201603306

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mar'ie Muhammad
NIM : C93215064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : mariemuhammad07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 106/Pid.B/2016/PN.Pdl)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Mei 2019

Penulis

Mar'ie Muhammad

Dengan kejahatan tindak pidana penadahan termasuk *jarīmah ta'zīr*, dimana *jarīmah ta'zīr* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarīmah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarīmah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam *jarīmah ta'zīr ini*, Alquran dan Hadis tidak menetapkan secara jelas, baik dalam bentuk *jarīmah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarīmah ta'zīr*) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya.

Ketertarikan Penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut Penulis kasus dari Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang penadahan yang dilakukan terdakwa bernama Mas'ud Bin Murtado perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari jum'at tanggal 26 february sekitar jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya kadu banen rangkas bitung kp.kadu banen kel. Kabayan kec. Pandeglang kab. Pandeglang. Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor Ka. MHIJBK119EK096413 Nomor Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 dari saksi Zulfikri (dalam perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sepeda motor tersebut yang dibeli oleh terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kendaraan.

Harga pasaran pada umumnya sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 tersebut sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam

juta rupiah) dan terdakwa membeli motor tersebut dengan harga yang sangat jauh dari pasaran pada umumnya yaitu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Maka dalam hal ini sudah sepatutnya terdakwa ketahui dan menduga bahwa sepeda motor merk honda revo fit warna hitam yang dibelinya itu merupakan barang hasil kejahatan. Namun terdakwa tetap membelinya dikarenakan terdakwa merasah untung dengan harga yang sangat murah bisa mendapatkan sepeda motor yang harganya masih sangat tinggi di pasaran.

Maka sudah jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan tindak pidana penadahan. Namun dalam hal ini musyawarah hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke 1 KUHP, tetapi hakim menjatuhkan menggunakan pasal 372 KUHP. Karena sudah dijelaskan dalam pasal 182 ayat 4 KUHP disebutkan bahwa dalam musyawarah hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Tetapi dalam putusan ini hakim menjatuhkan pasal di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana penadahan yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)”.

Elektronik dalam Putusan Nomor: 376/Pid.B/2015/PN.Smg. Tentang penadahan di Semarang. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana penadahan pada putusan Nomor: 376/Pid.B/2015/PN.Smg.¹²

2. Pada skripsi yang di tulis oleh Eka Sulistya Nugraha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)” dalam skripsi ini, Majelis hakim telah menetapkan terdakwa pada putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska yang telah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan majlis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.¹³
3. Pada skripsi yang ditulis oleh Riezky Arieawan Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya yang berjudul: Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP, tujuan dari penelitian Ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak

¹² Dimas Ary Prayugo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik : Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2015/PN. Smg*”. (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹³ Eka Sulistya Nugraha yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil: Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska* (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009).

pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur didalam pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, hakim sebelum memberikan putusan hakim menggali, mengikuti dan memahami norma-norma hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁴

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini Penulis akan menunjukkan bahwasanya pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang sudah pernah dibahas dari beberapa judul skripsi di atas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, Penulis lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim tentang Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor serta tinjauan hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Penulis mengkaji tindak pidana penadahan tersebut dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl sebab dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan Pasal terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini tidak sejalan dengan pasal 182 ayat 4 KUHP.

¹⁴ Riezky Arieawan Rinaldi yang berjudul "*Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP*", (Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2011)

ta'zīr, macam-macam sanksi *jarīmah ta'zīr*, tujuan sanksi *jarīmah ta'zīr*, serta sanksi perbuatan *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan oleh penadah,

Bab ketiga menyajikan hasil penelitian yang menjelaskan tentang profil Pengadilan Negeri Pandeglang, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Bab keempat berisikan pembahasan atau menganalisis tentang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah agar dapat dikenai hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya mempunyai arti sebagai pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara dapat pula menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi sebagai hukuman tambahan. Terdapat dua jenis hukuman penjara yaitu: hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas diberikan kepada pelaku jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba, berbuka puasa disiang hari pada bulan ramadhan, kesaksian palsu, dan lain sebagainya. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, menurut Imam Abu Hanifa diberikan kepada pelaku *jarīmah* homoseksual, mempraktikkan ilmu hitam (menyantet) serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi waktunya melainkan sampai pelaku bertaubat ataupun meninggal dunia.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan adalah termasuk hukuman had, namun dalam peraktiknya hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*, hukuman pengasingan juga diterapkan terhadap pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Di antara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi yaitu dengan mengasingkan ke luar

sepeda motor warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor: Ka. MH1JBK119EK096413 Nomor: Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 kepada terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi Yasid menawarkan sepeda motor melalui media social Facebook kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Yasid masalah surat-surat kendaraan tersebut dan saksi Yasid menjawab “ tidak tahu “ dan kemudian saksi Yasid mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Zulfikri butuh uang untuk kebutuhan pacaran sehingga terdakwa merasa tertarik dikarenakan sepeda motor tersebut merasa murah lalu saksi Yasid menghubungi saksi Zulfikri Aulia untuk mengajak bertemu di daerah Kampung Kadu Banen Pandeglang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Yasid mendatangi saksi Zulfikri di tempat Kampung Kadu Banen Pandeglang dan melihat saksi Zulfikri membawa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor: Ka. MH1JBK119EK096413 Nomor: Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 kemudian transaksi jual beli terdakwa dengan saksi Zulfikri lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi Zulfikri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya berupa STNK dan BPKB kendaraan. Akibat kejadian tersebut saksi korban Dia Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,-. (Enam

motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.400.000,- dan selanjutnya saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- e. Terdakwa telah membeli sepeda Honda Revo tersebut pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar terminal Kadu Banen.
- f. Bahwa yang membeli sepeda motor Revo dari saudara Zulfikri yaitu paman saksi sendiri yang bernama terdakwa Mas'ud.
- g. Benar bahwa saksi Zulfikri yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya di media sosial Facebook saksi melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo akan dijual dan kemudian saksi membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri dan Zulfikri mengantakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.400.000,- dan selanjutnya saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- i. Sepeda motor yang akan di jual tersebut adalah miliknya sendiri hasil dari lesing atau kredit.
- j. Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan saudara Zulfikri.

- d. Saksi menunggu saudara Zulfikri di Jalan Pusdiklat Provinsi Banten sekitar 3 (tiga) jam dan setelah itu saudara Zulfikri tidak datang lagi yang katanya hanya sebentar meminjam sepeda motor tersebut.
- e. Setelah Saksi ketahui saudara Zulfikri tidak kunjung datang kemudian Saksi bersama teman-teman saksi menyusul ke rumah saudari Hana akan tetapi saudara Zulfikri tidak ada di rumah saudari Hana kemudian saksi balik lagi ke Jalan Pusdiklat Provinsi Banten dan menunggu sampai dengan pukul 20.00 WIB setelah saudara Zulfikri, kemudian saksi pulang dan memberitahukan kepada ibu saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di pinjam oleh saudara Zulfikri dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak di kembalikan lagi oleh saudara Zulfikri.
- f. Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian sector cadasari pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB di Kampung Rt. 07 Rw.03 Desa Suka rendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Banten karena tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- g. Saksi telah melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: Ka MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin JBK1E-1096544, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK Darmadji, M.PD Alamat Komplek Ambuleuit RT. 02 RW. 12 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

- h. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang tepatnya di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten.
- i. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah Farras dan saksi awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan korban tersebut.
- j. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan sebentar untuk mengantarkan teman sekolahnya namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan akan tetapi oleh saksi sepeda motor tersebut malah di jual kepada terdakwa Mas'ud.
- k. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan adalah saksi sendiri.
- l. Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada terdakwa Mas'ud awalnya menawarkan melalui jaringan sosial online Facebook forum jual beli atas nama akun Yazid yang beralamatkan di Cipacung, kemudian setelah itu janji bertemu di Jalan raya Kadu Banen Rangkas Bitung tepatnya di Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan

Tanjung Kabupaten Pandeglang. Bahwa saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang tepatnya di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten.

- c. Yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah Farras dan Saksi awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan korban tersebut.
- d. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan sebentar untuk mengantarkan teman sekolahnya namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan akan tetapi oleh saksi sepeda motor tersebut malah di jual kepada terdakwa Mas'ud.
- e. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan adalah saksi sendiri.
- f. Saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada terdakwa Mas'ud awalnya menawarkan melalui jaringan sosial online Facebook forum jual beli atas nama akun Yazid yang beralamatkan di Cipacung, kemudian setelah itu janji bertemu di jalan raya Kadu Banen Rangkas Bitung tepatnya di Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang

3. Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tersebut pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di jalan raya kadu banen rangkas bitung Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dari saksi Zulkifli Aulia.
4. Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Zulkifli Aulia dengan alasan sepeda motor tersebut dapat hasil tarikan lesing dari lampung dan Zulkifli Aulia mengaku bahwa Zulkifli Aulia mengaku bekerja di leasing bagian penarikan.
5. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi Awalnya saksi Zulkifli Aulia menawarkan di jaringan social Facebook melalui akun keponakan terdakwa yang bernama Yazid dan setelah itu mengajak ketemuan di daerah Kadubanen dan di situlah langsung terjadinya transaksi jual beli terdakwa bersama Zulkifli Aulia.
6. Sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Yazid (keponakan terdakwa) di media sosial Facebook handphonenya dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor HondaRevo akan dijual dan kemudian saksi Yazid (keponakan terdakwa) membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.400.000.

itu diperoleh karena kejahatan. Bahwa yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan.

Bahwa untuk mengetahui sesuatu barang merupakan hasil kejahatan dapat diketahui dari harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan dilakukan dengan bersembunyi-sembunyi, dan hal itu dapat disangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi Zulfikri. Awalnya saksi Zulfikri menawarkan di jaringan social Facebook melalui akun keponakan terdakwa yang bernama Yazid dan setelah itu mengajak ketemuan di daerah Kadubanen dan di situlah langsung terjadinya transaksi jual beli terdakwa bersamasaksi Zulfikri. Bahwa sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya terdakwa mendapat informasi dari Saksi Abu Yazid bin Yasin (keponakan terdakwa) di media sosial Facebook handphonenya dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo akan dijual dan kemudian Saksi ABU Yazid bin Yasin (keponakan terdakwa) membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri dan Zulfikri mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,-. Selanjutnya Saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp. 1.000.000,- dan setelah sepatat kemudian bertemu di sekitar terminal

dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum, oleh karena itu tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang.

Unsur ke-2 ini sifatnya alternative dan bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatannya yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, dan cukup salah satu saja jenis perbuatan yang disebut dalam unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa Mas'ud Bin Murtado pada hari jum'at tanggal 26 februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya kadu banen, rangkas bitung pandeglang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi Tahun 2014 dari saksi Zulfikri Aulia (dalam perkara terpisah) yang diperolehnya dari hasil penggelapan (kejahatan).
- b. Terdakwa Mas'ud Bin Murtado telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kendaraan.

- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : UINSunan Ampel Press, 2014
- Mawardi (al). *Al-AhkamAsSulthaniyah*. Mesir: MaktabahMusthofa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukumpidanaislam*. Jakarta: sinargrafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 2008.
- Munajat, Makhrus. *DekontruksiHukumPidana Islam*. Jogjakarta: LogungPustaka, 2004.
- . *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Narbuko, Cholid., Abu Ahmadi. *MetodologiPenelitian*. Jakarta :BumiAksara, 1997.
- Purnomo, Bambang. *OrientasiHukumAcaraPidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarthabuku, 1988.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Savella, Consuelo G. *PengantarMetodePenelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sabiq, Sayyid. Ringkasan *Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017).
- . *Fiqh Sunnah Jilid II*, : Beirut: Dar At-Turath, tt.
- Soesilo, *KUHP dan KUHP*, Bogor: Politeia, 2008.
- . *KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) danKomentar-Komentar*. Politeia,Bogor, 1991.

- Subrata, Kubung. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Zuhaili (al), Wahab. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 6. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Nugraha, Eka Sulistyia. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil: Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska”. Skripsi- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Prayugo, Dimas Ary. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik: Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2015/PN. Smg”. Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Rinaldy, Riezky Arieawan. “Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP”. Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2011.
- Ali, Muhammad. “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, *Tahdis*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.
- Mamahit. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23 Nomor 8. Januari, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6b580a4b1c20911b60cd8d4661bcd432>, diakses pada 5 Maret 2019.